

Editor: Lukman Yudho Prakoso, Muhammad Ikmal Setiadi, Rianto



PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
KEPULAUAN RIAU

Agus Izudin, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono



PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
KEPULAUAN RIAU

Agus Izudin, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono



PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN KEPULAUAN RIAU

Tim Penulis:

**Agus Izudin, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Lukman Yudho Prakoso
Muhammad Ikmal Setiadi
Rianto**

ISBN:

**978-623-459-936-7
978-623-459-937-4 (PDF)**

Cetakan Pertama:

Januari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Potensi ancaman keamanan di perairan Laut China Selatan tidak dapat terelakan. Untuk menghindari perluasan konflik di wilayah Laut Natuna Utara, tidak hanya mengandalkan kekuatan TNI saja, tetapi juga perlunya pengembangan potensi sumber daya nasional (SDN) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dapat dicapai melalui konsep pemberdayaan wilayah pertahanan (wilhan).

Usaha pemberdayaan wilhan di wilayah Kepri dapat dipecah menjadi sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawab Komando Wilayah di daerah. Kesimpulan tulisan pemberdayaan wilayah di Kepri belum optimal ditinjau dari aspek aspek Pengelolaan SDN, Sinergi antara pemangku kepentingan terkait

Buku ini menjadi salah satu referensi yang bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk para pembaca untuk berbagai kemanfaatan, terutama dalam pengembangan ilmu terkait keamanan maritim. Semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2024

Kapus Jurnal dan Publikasi, LPPM, Unhan RI

Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., SIP., MAP., CIQaR., M.Tr.
Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama:
ABK	Anak Buah Kapal
AIS	<i>Automatic Identification System</i>
Baharkam	Badan Pemelihara Keamanan
Bakamla RI	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BT	Bujur Timur
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditpolair	Direktorat Kepolisian Perairan
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	<i>Gross Tonnage</i>
IUU	<i>Illegal Unreported Unregulated</i>
IPOA	<i>International Plan of Action</i>
JTB	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
Kakorpolairud	Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
KIA	Kapal Ikan Asing
KII	Kapal Ikan Indonesia
KM ²	Kilo Meter persegi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP	Kapal Polisi
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LU	Lintang Utara
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nm	Nautical Mile
No.	Nomor
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen	Peraturan Menteri
Perkap	Peraturan Kapolri
PMD	Poros Maritim Dunia
Polair	Kepolisian Perairan
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	<i>Standart Of Procedure</i>
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekjen	Sekretaris Jenderal
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
UU	Undang-Undang
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
VTMS	<i>Vessel Traffic Monitoring System</i>
WPP-RI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEEI	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Pertahanan Negara	15
BAB 3 Operasi Militer dan Pemberdayaan Wilayah	17
BAB 4 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Kepulauan Riau Saat Ini	21
BAB 5 Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Kepulauan Riau Mendukung OMSP Menghadapi Konflik di Laut Natuna Utara	47
DAFTAR PUSTAKA	90



PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Bab IV Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Pelaksanaan tugas pokok TNI tersebut dilakukan melalui OMP (Operasi militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa salah satu bagian dari tugas OMSP TNI ialah melaksanakan upaya pemberdayaan wilayah Pertahanan (wilhan) dan elemen pendukungnya secara dini sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan yang bersifat semesta.

Mencermati perkembangan lingkungan strategis Indonesia saat ini dan dalam beberapa tahun mendatang terdapat indikasi suatu ancaman militer konvensional yang dipengaruhi oleh memanasnya konflik di Laut China Selatan. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis Laut China Selatan terhadap Indonesia ditandai dengan penerbitan “Peta Standar China 2023” oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin 28 Agustus 2023. Pada Peta Standar China 2023 ini terdapat klaim *nine-dash-line* China yang melingkupi wilayah sengketa maritim di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Vietnam, serta wilayah utara Kepulauan Natuna yang juga masih bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (bbc.com, 2023).



PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Eppler (2009) dalam Tippe (2016) menjelaskan bahwa pertahanan adalah wajah untuk mengenal (recognizable face) suatu negara. Pertahanan adalah kebutuhan nasional yang benar-benar ada dan utama sejak kedaulatan sebuah negara memperoleh pengakuan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Budiardjo (2008) dalam Tippe (2016) bahwa secara alami, pertahanan negara tumbuh dan berkembang pada sebuah sistem politik terkait dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan dalam kerangka sistem politik.

Di dalam buku putih pertahanan (2015) dijelaskan bahwa pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam



OPERASI MILITER DAN PEMBERDAYAAN WILAYAH

Operasi militer adalah segala kegiatan meliputi penggunaan dan penyusunan strategi, taktik, pelayanan training, maupun misi administrasi militer dimana prosesnya dapat melibatkan pertempuran, atau kombat, dimana termasuk didalamnya pergerakan, supply dan logistik, penyerangan, pertahanan, dan penggunaan manuver untuk mencapai tujuan pertempuran atau kampanye militer apapun (Erdeniz, 2017).

Operasi militer meliputi 3 level utama yaitu, Strategi, operational dan taktikal. Strategi adalah bagaimana kita dapat secara efektif mengerahkan setiap sumber daya nasional yang kita miliki, sedangkan operational adalah bagaimana memberdayakan man power atau tentara nasional dalam menjalankan misi untuk memperoleh informasi atau keuntungan terhadap lawan serta optimalisasi strategi, taktik adalah bagaimana integrasi setiap informasi yang ada untuk mensukseskan kampanye militer yang sangat erat kaitannya dengan interferensi lingkungan dan kondisi medan (Chmielewski et al., 2020).

Operasi militer menurut UU No. 34 tahun 2004 adalah bagaimana TNI dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan dan melaksanakan pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Operasi militer ini dibagi menjadi dua yaitu Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer perang, berhubungan erat dengan perang dan pertahanan konvensional dalam battlefield. Sedangkan operasi militer selain perang menurut UU No 34 tahun 2004 dijabarkan ke dalam 15 tugas OMSP.



PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI KEPULAUAN RIAU SAAT INI

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada UU RI Nomor 25 tahun 2002. Provinsi ini adalah provinsi ke-32 di Indonesia dan mencakup wilayah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kabupaten Lingga.

Perjalanan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang di singkat Prov. Kepri memerlukan perjuangan yang tidak mudah menguras pikiran tenaga tanpa pamrih dari berbagai unsur dan elemen masyarakat yang berada di Kepulauan Riau maupun yang berada di luar kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau disahkan oleh DPR RI dengan hak inisiatif DPR RI melalui suatu proses yang jarang digunakan oleh badan legislatif sejak zaman Orde baru. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ibu kota Provinsi Riau waktu itu adalah Tanjungpinang. Kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1959.

Pindahanya ibukota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru mendasari suatu perubahan penting dalam sejarah perkembangan sosial, ekonomi dan politik di Kepri.



STRATEGI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI KEPULAUAN RIAU MENDUKUNG OMSP MENGHADAPI KONFLIK DI LAUT NATUNA UTARA

Berdasarkan Undang-Undang No.25/2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No.33/2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna (BPS, 2021). Natuna merupakan daerah di Kepulauan Riau ikut berimbas menjadi sumber ketegangan. Hal ini dikarenakan adanya klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui sebagai dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna. Realitas data menunjukkan bahwa Kepri merupakan kawasan strategis dimana salah satu kabupaten yang berada di bawah otonomi daerah Kepri, Natuna, adalah sumber penghasil kekayaan laut dan migas Indonesia.

Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang paling dekat dengan kawasan konflik Laut China Selatan. Letak Kepri yang berada pada ALKI-I merupakan kawasan yang bukan hanya dekat dengan LCS yang diperebutkan oleh beberapa negara, namun juga sebagai jalur perdagangan yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan. Untuk mencegah meluasnya konflik Laut Natuna Utara tentunya diperlukan kesiapan dan kekuatan serta kemampuan pertahanan di Kepulauan Riau yang adaptif dan optimal. Dengan kesiapan dan kemampuan tersebut diharapkan akan terbangun suatu kekuatan kewilayahan yang Tangguh dalam mengatasi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amarullah, Bagus Badari. (2023). Strategi Operasi Kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Bakamla Republik Indonesia Dalam Mendukung Pengendalian Laut di Laut Natuna Utara Guna Menegakkan Kedaulatan dan Hak Berdaulat Republik Indonesia pada Masa Damai. Universitas Pertahanan RI
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dephan RI. Proyeksi Sumber Daya Pertahanan Negara T.A 2004. Jakarta Kementerian Pertahanan. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara. Jakarta: Kemhan.
- Kementerian Pertahanan RI. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Marsetio. (2014). Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A methods sourcebook (3 ed.)*. USA: Sage.
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Moeliono, Anton M. dkk. (1993). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Susanto, Munaf Dicky. (2015). Komando dan pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut. Jakarta: Gramedia
- Tri Sulistyaningtyas, Susanto dan Dicky R. Munaf, Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tippe, Syarifudin. (2014). Ilmu pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yuwono Agung Nugroho, Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia, 2005.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

JURNAL

- Alfred Thayer Mahan. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783* (12th ed.). Little Brown and Company. <https://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm>
- Annisa Lestari. (2013). *Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka: Tawaran Proliferation Security Initiative 2006-2008*. Tesis Ilmu Hubungan Internasional. Depok: Universitas Indonesia.
- Datumaya Wahyudi. (2017) *Meraih Interoperabilitas TNI AU Sebuah Pendekatan Ilmiah Sederhana*. *Journal Angkasa Cendekia*, hal. 18-33
- Liss., Carolin. (Februari 2007). *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place?*. Asia Research Centre: Working Paper No.141.
- Hakim, C. (2012). *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia? Tragedi Aru, Insiden Bawean, dan...* Jakarta: Red and White Publishing.
- Hartono, Endra.(2020). *"Interoperabilitas Operasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara (Studi Pada Operasi Di Perairan Ambalat)"*. Universitas Pertahanan
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., Risman, H., La Ode, M. H., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). *Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasanuddin International Airport)*. *Sciences*, 4(2), 76–86. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.277>

WEBSITE

- bbc.com. (2023). *"Peta baru China: Mengapa aksi China menuai kontroversi, dan haruskah Indonesia khawatir?"*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66668869> diakses pada 24 November 2023
- bbc.com. (2021). *"Laporan China minta Indonesia hentikan pengeboran minyak di Laut Natuna: 'Indonesia tidak perlu takut' karena beroperasi di wilayah hak berdaulat"*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59505406> diakses pada 24 November 2023

- cnn.com. (2022). "China Latihan Militer Besar-besaran di LCS Usai AS Kirim Kapal Induk". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719183641-113-823512/china-latihan-militer-besar-besaran-di-lcs-usai-as-kirim-kapal-induk>. diakses pada 24 November 2023.
- Dispen AL. (2021). "TNI AL Gelar FGD Bahas Strategi Hadapi Konflik di Laut China Selatan". Diakses dari <https://indonesiadefense.com/tni-al-gelar-fgd-bahas-strategi-hadapi-konflik-di-laut-china-selatan/> diakses pada 24 November 2023.
- Kemhan.go.id. (2016). "Kapal TNI AL Diprovokasi Kapal Penjaga Pantai China". Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/06/21/kapal-tni-al-diprovokasi-kapal-penjaga-pantai-china.html> diakses pada 24 November 2023
- Iqbal, Muhammad. (2020). "Tegas! Kapal Perang RI Usir Coast Guard China di Laut Natuna". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103112805-4-127376/tegas-kapal-perang-ri-usir-coast-guard-china-di-laut-natuna> diakses pada 24 November 2023.
- Sorongon, Tommy Patrio. (2021). "Heboh Kapal China di Natuna Ganggu Tambang, RI Kirim Protes?". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210914102533-4-276049/heboh-kapal-china-di-natuna-ganggu-tambang-ri-kirim-protes> diakses pada 24 November 2023
- Yuniar, Resty Woro (2020). "Laut China Selatan: Kapal-kapal China diprediksi 'akan masuk lagi' ke Natuna, Indonesia perlu 'investasi di kapal-kapal patroli'". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54164982> diakses pada 24 November 2023
- voaindonesia.com. (2021). "China Protes Aktivitas Pengeboran dan Latihan Militer Indonesia di Natuna". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/china-protes-aktivitas-pengeboran-dan-latihan-militer-indonesia-di-natuna/6334740.html> diakses pada 24 November 2023
- Wardah, Fathiyah. (2023). "TNI Akan Lakukan Pengamanan Terbatas di Laut Natuna Utara". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/tni-akan-lakukan-pengamanan-terbatas-di-laut-natuna-utara-/6955564.html> diakses pada 24 November 2023.

PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN KEPULAUAN RIAU

Tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Pelaksanaan tugas pokok TNI tersebut dilakukan melalui OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa salah satu bagian dari tugas OMSP TNI ialah melaksanakan upaya pemberdayaan Wilayah Pertahanan (wilhan) dan elemen pendukungnya secara dini sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan yang bersifat semesta. Kesadaran satuan TNI dan Polri untuk bersinergi dalam mengamankan wilayah perairan Kep. Riau telah terbentuk dan terus diupayakan untuk lebih baik dalam melaksanakan pengamanan dan pertahanan, terutama di wilayah Laut Natuna Utara yang bernilai strategis bagi kedaulatan bangsa Indonesia, namun dalam perjalanannya upaya sinergitas TNI dan Polri masih memiliki beberapa kendala.